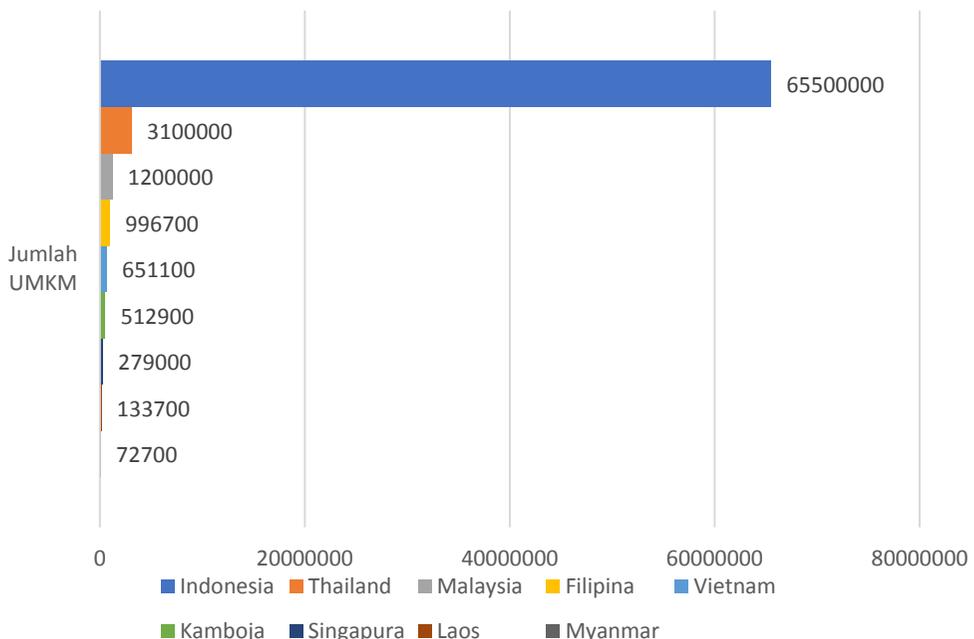


Keberlanjutan Bisnis (*Sustainable Business*) UMKM ditinjau dari Aspek Literasi Keuangan

Indra Fahmi

Pendahuluan

Pada September 2022, *ASEAN Investment Report* menulis bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terbanyak di Kawasan ASEAN (Ahdiat, 2022). Keadaan ini diperkuat oleh data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah UMKM 58,97 juta orang, sedangkan pada Maret 2021 jumlah UMKM telah mendekati jumlah 65,46 juta orang, dan diprediksi akan terus bertambah kedepannya. Keberadaan UMKM secara nasional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi negara ini, dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta berkontribusi 61,07% dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 8.573,89 triliun dan dapat mengumpulkan hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia. Tapi, jika ditinjau dari kinerjanya, Indonesia masih kalah dari Myanmar, yang UMKM-nya mampu menyumbang hingga 69,3% terhadap PDB setempat (Ahdiat, 2022).



Gambar 1 Jumlah UMKM di Kawasan ASEAN

Permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia berupa rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi yang masih terbatas, sumber daya modal yang kurang, manajemen yang masih tradisional, infrastruktur yang belum

memadai, belum terbentuknya saluran distribusi rantai pasok (*supply chain*) bahan baku maupun hasil produksi (pemasaran), dan sulitnya memperoleh izin usaha atau badan hukum (Amri, 2014). Yustika (2005) dalam penelitiannya mengatakan bahwa UMKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi. Dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 8 dari 10 pemilik usaha kecil gagal di tahun kedua.

“Berhasil atau gagalnya sebuah usaha bergantung pada stabilitas kondisi keuangan (Frimpong, 2014), sedangkan saat ini mayoritas UMKM hanya berfokus pada penjualan dan pangsa pasar, dan mengabaikan esensi dari manajemen keuangan, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah manajemen keuangan dan akuntansi yang benar” (Rumbianingrum & Wijayangka, 2020). Masalah yang terjadi karena keuangan bukan hanya diakibatkan dari rendahnya pendapatan, tetapi juga berasal dari kesalahan pengelolaan keuangan (*miss management*), seperti pengelolaan kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan (Amanita, 2017). Pengelolaan keuangan ini mencakup tentang kemampuan membaca, menganalisis, mengelola, dan mengkomunikasikan tentang kondisi keuangan. Pengetahuan mengenai keuangan dan kemampuan mengaplikasikan ilmu keuangan disebut dengan literasi keuangan (*financial literacy*) (Lusardi, Mitchell, & Curto, 2010). Aspek yang merupakan bagian dari literasi keuangan antara lain (Chen & Volpe, 1998):

- 1) Literasi keuangan tentang pengetahuan keuangan dasar yang berkaitan dengan pemahaman tentang keuangan pribadi secara umum.
- 2) Literasi keuangan tentang simpanan dan kredit yang berkaitan dengan pemahaman tentang menabung dan meminjam di lembaga keuangan.
- 3) Literasi keuangan tentang investasi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang suku bunga, reksadana, dan risiko investasi.
- 4) Literasi keuangan tentang asuransi yang berkaitan dengan pemahaman tentang produk-produk asuransi

Berdasarkan hasil survei Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLIK) tahun 2019 yang dilakukan oleh OJK, tingkat literasi keuangan pada kelompok UMKM sebesar 56,99%. Literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM adalah sebuah keharusan untuk dimiliki dalam pengelolaan dan keberlanjutan usaha. Dengan pengelolaan dan pengetahuan keuangan yang baik, diharapkan tingkat kesejahteraan finansial masyarakat meningkat dan mampu menggunakan sumber daya finansialnya dengan bijak. Selain itu, mengedukasi masyarakat tentang produk keuangan, baik bank maupun non bank, akan mengurangi kemungkinan tersesatnya masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Indikator Literasi Keuangan

1. *General Knowledge About Financial*

Pengetahuan umum tentang keuangan mencakup pengetahuan pengelolaan keuangan untuk pribadi, hal ini tergantung bagaimana seseorang dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran serta memahami konsep dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Wagland & Taylor, 2009). Konsep-konsep keuangan penting bagi seseorang untuk menginvestasikan dan mengelola dananya untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan

(*financial well-being*). Pemahaman keuangan yang baik terlihat dari tiga indikator yaitu: peningkatan kesadaran (*awareness*), pelaksanaan perubahan perilaku dan pelaksanaan masyarakat yang “ramah bank”. Pelaku UMKM yang telah memiliki kesadaran keuangan yang baik, akan mendorong terbentuknya perilaku keuangan (*financial behaviour*) yang baik pula seperti membayar kewajiban tepat waktu, memiliki kebiasaan menabung, dan mampu mengelola pendapatan serta pengeluaran keuangan usahanya. Sebagian besar pelaku UMKM sadar akan adanya produk dan layanan jasa keuangan dari bank, namun banyak dari mereka tidak mengetahui persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Sebagian pelaku UMKM juga masih kurang kesadaran tentang berbagai instrumen keuangan lainnya.

2. Saving and Borrowing

“Baik atau tidaknya tingkat literasi tentang simpanan dan pinjaman seseorang dilihat dari sejauh mana seseorang tersebut mengetahui tata cara menabung yang tepat, serta mengetahui syarat dan ketentuan mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan” (Chen & Volpe, 1998). Pelaku dengan literasi keuangan yang buruk mudah tertipu untuk membelanjakan uang mereka. Di sisi lain, masyarakat dengan literasi keuangan yang tinggi dapat memilih dan menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya, kemampuan untuk menerapkan perencanaan keuangan yang lebih baik, misalnya mendorong keinginan untuk menabung, menghindari investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas dan memahami manfaat dan risiko dari produk dan jasa keuangan.

Namun kenyataannya, hanya 20% UMKM yang memiliki akses ke perbankan (Hidayat, 2022), penyebabnya adalah beberapa aturan masih dinilai tidak ramah terhadap UMKM seperti harus adanya jaminan (*collateral*), kecukupan modal, kemampuan membayar, maupun kelayakan usaha untuk pengajuan pinjaman. Sedangkan, pinjaman adalah hal penting bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan permodalannya. Upaya yang dapat dilakukan UMKM dalam meningkatkan akses modal, yakni dengan menggunakan transaksi pembayaran menggunakan akses digital, supaya aliran dana yang masuk ke rekening usaha dapat tercatat secara sistem dan terbaca oleh perbankan. Hal ini akan memudahkan UMKM dalam menjalin akses dengan industri perbankan dalam memberikan bukti laporan keuangannya.

3. Insurance

Asuransi penting bagi perusahaan kecil dan menengah, mengingat ketidakpastian keuangan yang semakin meningkat saat ini. Dengan adanya asuransi kesehatan, asuransi aset, asuransi jiwa, atau asuransi kendaraan dapat membantu UMKM meminimalkan risiko dan menekan kerugian (Rasyid, 2012). Hal ini disebabkan karena dimana pihak perusahaan asuransi telah mengikatkan diri kepada UMKM, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita UMKM, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

4. Investment

Investasi adalah sejumlah dana yang diberikan kepada lembaga atas dasar komitmen yang dilakukan dengan tujuan akan memperoleh keuntungan di masa depan (Tandelilin, 2001).

Pada penelitian Kappor et al, (2004) ada lima faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berinvestasi, yaitu:

- 1) Keamanan dan risiko,
- 2) Komponen faktor risiko,
- 3) Pendapatan investasi,
- 4) Pertumbuhan investasi,
- 5) Likuiditas.

Peran literasi investasi dapat membantu UMKM mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang investasi dan alat terkait investasi dalam bisnis, seperti investasi dalam properti untuk mendukung bisnis atau untuk diversifikasi bisnis (ekspansi bisnis). Masih banyak pelaku UMKM yang tidak secara rutin merencanakan program investasi setiap bulan untuk mencapai tujuan tertentu. Padahal, investasi sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha di masa depan, seperti investasi dalam bentuk fisik (alat produksi, properti) maupun bentuk non fisik (tabungan, saham, investasi). Selain itu, UMKM dengan pengetahuan keuangan investasi yang baik dapat membuat keputusan investasi yang tepat, menganalisis faktor risiko dan menentukan perhitungan pendapatan usaha. Kemudian pemilik UMKM dengan pengetahuan keuangan yang baik menghindari penipuan investasi dengan kedok pengembalian tinggi atau penipuan investasi.

Manfaat dan Tujuan Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan memiliki tujuan dan manfaat jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat. Adapun tujuannya yaitu:

- a. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
- b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan.

Sedangkan untuk manfaat yang akan didapatkan dalam memahami literasi keuangan, yaitu:

- a. Dapat memilih dan menggunakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan
- b. Memiliki kesempatan untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik.
- c. Terhindar dari investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
- d.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Kemampuan dan pengetahuan seseorang mengenai keuangan pasti berbeda pada tiap individu dan terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi literasi keuangan. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan (OJK), yaitu: jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Faktor lainnya yang mempengaruhi literasi keuangan menurut Widayati (2014), yaitu “status sosial ekonomi orang tua, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, dan pembelajaran di perguruan tinggi”. Adapun penelitian dari Suryanto dan Mas Rasmini (2018) menambahkan usia sebagai

faktor yang berpengaruh simultan dengan tingkat pendidikan formal dan pendapatan usaha dalam mempengaruhi literasi keuangan UMKM.

1. Jenis Kelamin

Menurut beberapa penelitian sebelumnya ada kaitan antara jenis kelamin dan tingkat literasi keuangan, hal ini berkaitan dengan perbedaan pengambilan keputusan keuangan antara laki-laki dan perempuan (Widayati, 2014). Nababan dan Sadalia (2013) menyatakan bahwa laki-laki cenderung memiliki literasi keuangan personal yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laki-laki tidak banyak mempertimbangkan variabel-variabel yang berhubungan dengan keputusan investasinya, karena karakter laki-laki yaitu mandiri, tidak terlalu emosional, logis, mudah membuat keputusan, percaya diri, dan tidak terlalu membutuhkan rasa aman. Sedangkan perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam membuat keputusan keuangan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berani dalam mengambil keputusan mengenai keuangan dibandingkan perempuan (Christanti & Mahastanti, 2011). Menurut hasil dari SNLIK yang dilakukan OJK pada 2019 menunjukkan adanya perbedaan tingkat literasi keuangan antara laki-laki dan perempuan, tingkat literasi keuangan perempuan 50,30% lebih tinggi dibanding laki-laki 49,10%.

2. Pendidikan

Penelitian yang dilakukan oleh Suchuachi (2013) menunjukkan jika semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pelaku UMKM maka akan semakin tinggi juga literasi keuangannya. Pelaku UMKM yang memiliki Pendidikan tinggi akan lebih familiar terhadap istilah-istilah tentang keuangan, tanggap terhadap isu ekonomi, memiliki pemahaman terhadap masalah-masalah keuangan secara umum, dan tidak awam lagi terhadap aspek perbankan serta produknya (Suryanto & Mas, 2018). Pendidikan yang lebih tinggi memberikan lingkungan untuk membiasakan seseorang menyusun perencanaan, termasuk didalamnya perencanaan penggunaan keuangan. Mendorong untuk melakukan riset dan pengumpulan informasi sebelum memutuskan untuk bertindak, dalam hal ini mengenai manajemen risiko (asuransi) dan investasi uang merupakan bagian dari perencanaan keuangan. Semakin tinggi tingkat Pendidikan juga berpengaruh terhadap sikap seseorang untuk lebih kritis dan selektif dalam memilih produk keuangan, mempertimbangkan tingkat pengembalian beserta risiko-risiko yang akan diterima.

3. Usia

Perbedaan usia terhadap literasi keuangan terlihat dalam penggunaan teknologi dalam mengakses literasi keuangan. Hasil dari penelitian Suryanto dan Mas (2018), pelaku UMKM yang memiliki usia dibawah 20 tahun, lebih banyak mengakses tentang literasi keuangan melalui media cetak dan *online*, mereka memanfaatkan teknologi untuk mengakses isu-isu keuangan secara *real time*. Sedangkan para pelaku UMKM di usia 51 tahun ke atas, mereka lebih mengandalkan pengetahuan keuangan berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Pratiwi (2021) dalam penelitiannya membedakan populasi menjadi *digital immigrants* (lahir sebelum 1980) dan *digital natives* (lahir setelah 1980). Pada penelitiannya Pratiwi mendapati bahwa tingkat konsumsi dan transaksi penggunaan *paytech* oleh *digital natives* tidak seimbang dengan tingkat *saving* (menabung). Sebab penggunaan *paytech* ini dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, dan yang perlu disoroti adalah di Indonesia tingkat literasi keuangan masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan. Menurut pernyataan dari direktur pemasaran Asosiasi *Fintech* Indonesia, mengatakan bahwa 90 persen dari penghasilan anak muda habis oleh

lifestyle expenses, bukan dialokasikan kepada *saving* atau investasi (Pratiwi, 2021). Data yang didapat dari survey Bank UOB (2019), bahwa 50 persen dari penghasilan *digital natives* habis untuk *4S-Lifesyle*, yang terdiri dari *sugar* (makanan dan minuman), *skin* (kecantikan dan *personal care*), *sun* (wisata dan *leisure*) dan *screen* (konsumsi *digital screen*).

Tingkatan Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan warga negara Indonesia dapat dibagi menjadi empat bagian:

- a. *Well literate*, yakni memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risikonya, hak dan kewajibannya, serta kemampuan untuk menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risikonya, hak dan kewajibannya.
- c. *Less literate*, Hanya menyimpan informasi tentang lembaga jasa keuangan, produk dan layanan keuangan.
- d. *Not literate*, kurang memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga yang menyediakan layanan keuangan serta produk dan layanan keuangan, dan mereka kurang memiliki keterampilan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yang baik bersinergi dengan perkembangan perusahaan, yang mengacu pada pengalokasian dana untuk pembiayaan seluruh perusahaan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. “Pengelolaan keuangan UMKM terdiri dari sumber-sumber dana, manajemen kas, laporan keuangan dan penganggaran” (Andreas, 2011).

1. Sumber-sumber dana usaha

Sumber dana usaha kecil dapat diperoleh dari modal hutang dan modal ekuitas. “Sumber modal hutang merupakan modal yang diperoleh dari luar perusahaan seperti dana pinjaman dari bank, perusahaan pembiayaan, pemasok, dan pemerintah. Sedangkan modal ekuitas merupakan modal yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri seperti tabungan pribadi, anggota keluarga, dan teman” (Zimmerer, 2009). UMKM dapat berkembang lebih cepat jika usahanya tidak hanya dibiayai oleh modal sendiri, tetapi membutuhkan pengembangan usaha dengan bekerja sama dengan beberapa calon investor. Namun, mencari investor membutuhkan banyak kepercayaan terhadap usaha UMKM tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, yang dapat dilihat oleh calon investor sebagai pertimbangan atas investasinya. Lebih jauh lagi, pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik dapat memanfaatkan *digital finance* dalam permodalan usahanya seperti; *peer-to-peer (P2P) landing* dan *crowdfunding*. Namun yang

perlu diingat, penggunaan *digital finance* memerlukan pengetahuan dan *awareness* yang tinggi, supaya para UMKM tidak terjerat pinjaman *online illegal*.

2. Laporan keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir akuntansi yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Kegiatan usaha dalam skala besar ataupun kecil perlu melakukan pencatatan keuangan, supaya usaha tersebut memiliki data-data keuangan yang nantinya dipakai sebagai acuan pengambilan keputusan. Penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan di sektor UMKM sangatlah penting. Karena dengan standar laporan keuangan yang baik, usaha kecil dapat mengontrol biaya operasional perusahaannya dan menentukan laba rugi, kewajiban dan pajaknya. Sayangnya, sebagian besar UMKM tidak melakukan pencatatan laporan keuangan, atau sekedar mencatatkan jumlah pendapatan dan pengeluaran harian saja. Jika mereka melakukan pencatatan laporan keuangan, maka para pemilik usaha dapat mengevaluasi kemampuan dan kapasitas usahanya sehingga perencanaan pengembangan usaha dapat ditetapkan berdasarkan data pencatatan tersebut. Hal ini bisa diantisipasi dengan penggunaan laporan keuangan secara digital untuk memudahkan pembuatan laporan. Kelengkapan laporan keuangan sebuah usaha dapat membantu proses pengajuan pinjaman ke bank ataupun mencari pendanaan kepada investor.

3. Manajemen kas

Menurut Anwar (2019), “manajemen kas merupakan segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kas perusahaan yang umumnya terdiri dari pengelolaan kas masuk (*cash inflow*) dan pengelolaan kas keluar (*cash outflow*)”. Pengelolaan kas adalah salah satu fungsi terpenting perusahaan, karena pengelolaan kas yang baik mendorong kelancaran operasi bisnis. “Dengan manajemen kas maka akan diketahui proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode di masa mendatang sehingga akan diketahui kapan perusahaan akan mengalami surplus (kelebihan kas) atau akan mengalami defisit (kekurangan kas)” (Anwar, 2019).

Dengan memisahkan pencatatan keuangan pribadi dan usaha, para pemilik dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan usahanya. Hal ini karena akurasi pencatatan keuangan usaha dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja usahanya. Arus kas yang tercampur antara keuangan pribadi dan usaha dapat menyulitkan para pelaku UMKM dalam menentukan biaya operasional usaha. Salah satu cara untuk memisahkan pencatatan keuangan pribadi dengan usaha adalah pemilik dapat “menggaji” dirinya sendiri agar segala kebutuhan pribadi dicatat dari pos gaji tersebut.

Dengan pemahaman literasi keuangan yang cukup, pelaku UMKM dapat mempermudah pencatatan transaksinya menggunakan *payment technology* atau *paytech*. Selain sebagai sebuah layanan transaksi pembayaran yang menggunakan bantuan teknologi, *paytech* berfungsi dalam mempermudah dan mempercepat waktu transaksi. Pembayaran dapat menjadi faktor penentu dalam kepuasan pelanggan, menjangkau kelompok sasaran baru, atau kesuksesan retailer. Saat ini transaksi pembayaran hanya dengan “*one-click*” dan pembelian selesai. Dan dengan menggunakan *digital payment*, berupa tap card ataupun *paytech*, memungkinkan adanya pembelian impulsif dan kurangnya batasan fisik memfasilitasi peningkatan pengeluaran (Connors, 2019).

4. Penganggaran

Penganggaran adalah ”suatu proses penyusunan rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai” (Khusaini, 2019). “Ada empat jenis anggaran utama untuk bisnis kecil yaitu anggaran produksi, anggaran beban produksi, anggaran penjualan, dan anggaran kas” (Siregar, 2018). Dengan adanya anggaran, UMKM dapat mengidentifikasi tujuan operasional yang ingin dicapai. Seluruh kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan tujuan UMKM. Pelaksanaan suatu kegiatan dapat diukur apakah telah mencapai tujuan operasional yang telah ditetapkan.

Untuk pengelolaan risiko, ketika keuangan usaha sudah tercatat dengan baik dan laba dapat terukur dengan akurat, pelaku UMKM harusnya mulai menyisihkan sebagian laba ditahan untuk dana darurat dan asuransi. Dana darurat dapat digunakan apabila usaha mengalami bencana, musibah, dan hal-hal lain di luar rencana yang dapat mengganggu kinerja dan operasional usaha. Sedangkan, asuransi dapat meminimalkan risiko usaha apabila ada hal-hal tak terduga yang terjadi.

Pelaku UMKM juga perlu membuat sebuah perhitungan realistis tentang risiko dan rencana bisnis ketika akan mengajukan pinjaman atau kredit. Karena dalam bisnis, walaupun hutang dapat menjadi pengungkit untuk dapat meningkatkan kapasitas dan performa perusahaan. Namun, hutang yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah finansial bahkan kebangkrutan dalam usaha. Untuk menjaga kestabilan usaha, rasio hutang terhadap aset tidak boleh lebih dari 50%, dan rasio hutang terhadap pendapatan tidak lebih dari 30%. Sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman, perencanaan hutang wajib dilakukan sematang mungkin. Perencanaan anggaran yang perlu diperhatikan yaitu; seberapa besar hutang yang dibutuhkan, realisasi penggunaan hutang, dan kemampuan pembayaran kewajiban.

Penutup

Jika pelaku UMKM memiliki dasar literasi keuangan yang baik, mereka cenderung lebih efektif pengelolaan keuangannya dan proses pengambilan keputusan keuangan yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan *financial behaviour* UMKM dalam mengelola keuangannya, seperti meningkatkan tabungan, memiliki rencana investasi, serta menyusun rencana strategis untuk mengelola risiko bisnis. Peningkatan ini bisa mengantarkan para UMKM untuk mulai transisi menuju penggunaan *financial technology* baik dari segi pembayaran (*payment technology*), pendanaan dan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi digital. Ekosistem ini akan mendukung penguatan iklim investasi dan iklim usaha bagi para UMKM. Iklim investasi yang baik mendorong para investor atau pengusaha untuk menginvestasikan uangnya dalam pengembangan UMKM. Iklim usaha yang baik juga mendorong para pengusaha untuk lebih mendorong inovasi pada produk yang dihasilkannya untuk meningkatkan daya saing di pasar produk yang dihasilkannya.

Bibliografi

- Ahdiat, A. (2022, 10 11). *Databoks*. Diambil kembali dari Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>
- Amanita, N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi . *Jurnal Nominal*.
- Amri, F. (2014). Permasalahn UMKM: Strategi dan Kebijakan. *Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan*, (hal. 377-389).
- Andreas. (2011). *Manajemen Keuangan UMKM*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar, M. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Chen, H., & Volpe, R. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Services Review*, 107-128.
- Christanti, N., & Mahastanti, L. A. (2011). Factors Considered by Investors in Investing. *Journal of Theory and Applied Management*, 37-51.
- Connors, T. (2019). Diambil kembali dari Do We Still Need to Pay? In The PayTech Book: Do We Still Need to Pay? In The PayTech Book
- DSResearch. (2019). *Fintech Report*.
- Frimpong, S. (2014). Effect of Demand-Side Factors on Access to External Finance By Micro, Small and Medium Manufacturing Enterprises in Kumasi Metropolis. *a Thesis Submitted to School of Business in Partial Fullfilment of the Requirement for Award of Degree of Doctor O*.
- Hidayat, A. (2022, Desember 8). *Tempo.co*. Diambil kembali dari Pemerintah Jelaskan Penyebab Baru 20 Persen UMKM yang Miliki Akses ke Kredit Perbankan: <https://bisnis.tempo.co/read/1665920/pemerintah-jelaskan-penyebab-baru-20-persen-umkm-yang-miliki-akses-ke-kredit-perbankan>
- Kappor, J., Dlabay, L., & Hughes, R. (2004). *Personal Finance 7th Edition*. New York: The McGraw-Hill Company.
- Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Lusardi, A., Mitchell, O., & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young: Evidence and implications for consumer policy. *Journal of Consumer Affairs*, 358-380.
- Nababan, D., & Sadalia, I. (2013). Analisis Personal Financial Literacy and Financial Behaviour Mahasiswa Sastra 1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- OJK. (t.thn.). *OJK*. Diambil kembali dari Pengusaha UMKM Juga Perlu Pengelolaan Keuangan Loh: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20620>
- Pratiwi, R. (2021). The Effect of Financial Literacy on Intention to Use Payment Technology. *Thesis Padjadjaran University*.
- Rasyid, R. (2012). Analisis tingkat literasi keuangan mahasiswa program studi manajemen fakultas ekonomi universitas padang. *Kajian Manajemen Bisnis*, 91–106.

- Rumbianingrum, W., & Wijayangka, C. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Medan Marelan. *Pembangunan Perkotaan*, 45-50.
- Siregar, I. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Bogor. *Institut Pertanian Bogor*.
- Suchuachi, W. (2013). Determinants of Financial of Micro Entrepreneurs in Davao City. *International Journal of Accounting Research* .
- Suryanto, & Mas, R. (2018). Analisis Literasi Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Wagland, S., & Taylor, S. (2009). When It comes to financial literacy, is gender really an issue? *Australian Accounting Business and Finance Journal*.
- Widayati, I. (2014). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Pendidikan Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Pembelajaran di Perguruan Tinggi terhadap Literasi Finansial Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 176-183.
- Yustika, A. (2005). *Perekonomian Indonesia Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Malang: Banyumedia.
- Zimmerer. (2009). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil : Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.